

**PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, KEKAYAAN
PEMERINTAH DAERAH, DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP
PENGUNGKAPAN *INTERNET BUDGETING REPORTING*
(Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Pulau Sumatera)**

Deka Anugrah Hadi¹, Mia Angelina Setiawan²

¹Alumni Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang

²Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang

*Korespondensi: dekaanugrahhadi@gmail.com

Abstract: *Internet budgeting report is considered still have shortcomings because it is not in accordance with the Instruction of the Minister of Domestic. Even though this information is the responsibility of regional governments for transparency in regional management and avoiding budget leakage. This study aims to determine the effect of local government size, local government wealth, and population on internet budgeting reporting. There is difference in this study which are sample taken from district / city governments on the island of Sumatra. The district / city governments should has an official website for public access. The sampling technique was purposive sampling. A total of 154 districts / cities were used as sampled in this study and processed by using multiple linear regression techniques. The study results indicate that the local government size has a positive and significant effect on internet budgeting reporting. While local government wealth and population does not have a significant effect on internet budgeting reporting. Future studies are suggested to examine other variables that can affect internet budgeting reporting so that they can predict more accurately and expand the research sample*

Keywords: *Internet budgeting report; local government size; local government wealth; population.*

How to cite (APA 6th style):

Hadi, D.A., & Setiawan, M. A. (2020). Pengaruh Ukuran Pemerintah, Kekayaan Pemerintah Daerah, dan Jumlah Penduduk Terhadap Pengungkapan *Internet Budgeting Reporting* (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), Seri A, 2099-2114.

PENDAHULUAN

Penerapan *e-government* oleh pemerintah daerah dalam menyajikan informasi, dinilai masih terdapat kekurangan. Pada dasarnya informasi dasar sudah ada pada semua *website* pemerintah daerah. Akan tetapi ada persoalan pada fase interaksi dengan tampilan informasi

yang harus dibagikan pada publik. Pada fase ini masih terdapat banyak pemerintah daerah yang tidak menyajikan informasi keuangan di situs daerah yang bersangkutan. Meskipun sebagian besar *website* pemerintah daerah mencantumkan link untuk mengunduh informasi keuangan dan kinerja pemerintah daerah tetapi masih banyak yang hanya berbentuk halaman kosong (Cheisviyanny, 2018).

Informasi yang dibutuhkan oleh institusi publik atas pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah informasi kepatuhan terhadap aturan, informasi kinerja, informasi kondisi keuangan dan informasi perencanaan dan penganggaran. Tidak hanya itu, laporan keuangan pemerintah daerah juga harus berkualitas yakni relevan, andal, dapat dibandingkan, serta dapat di pahami oleh penggunaannya. Pengungkapan informasi dalam laporan keuangan memiliki dampak ekonomis dan substansial dalam pengambilan keputusan. Dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah, baik pihak eksekutif maupun legislatif sama-sama berkepentingan untuk memastikan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah telah memberikan penjelasan yang memadai mengenai kepatuhan terhadap aturan, informasi kinerja, informasi kondisi keuangan, serta informasi perencanaan dan penganggaran (Novia et.al, 2015).

Pentingnya pertanggungjawaban bagi pemerintah daerah adalah untuk transparansi pengelolaan di daerah agar dapat menghindari terjadinya kebocoran anggaran dari perencanaan yang tidak tepat. Masyarakat dapat mengetahui laporan kinerja yang berisi ringkasan informasi tentang input, proses, hasil dan keuntungan dari setiap kegiatan atau program yang dijalankan pemerintah daerah melalui laporan keuangan Pemda, sehingga dapat mengukur tingkat ekonomis, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program pemerintah daerah. Salah satu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat adalah lewat pelaporan keuangan melalui *internet*. Namun, tidak ada sanksi yang diterapkan jika tidak dipenuhi sehingga pengungkapan tersebut lebih bersifat secara sukarela (*voluntary disclosure*) (Nosihana & Yaya, 2016). Hal inilah yang dapat menyebabkan perbedaan kualitas dan informasi keuangan antar pemerintah daerah. Masyarakat merupakan *stakeholder* terbesar pemerintah pada dasarnya mempunyai hak untuk memperoleh informasi tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut. Ini tercantum dalam UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang di dalamnya dimuat bahwa salah satu hak asasi warga negara yang dilindungi oleh Undang-Undang adalah hak untuk mendapatkan informasi publik. Maka dari itu dianjurkan bahwa informasi-informasi yang wajar dikonsumsi oleh publik lebih baik diungkapkan.

Di Sumatera Barat sendiri terlihat bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran dan keuangan daerah merupakan persoalan yang belum kunjung tuntas hingga sekarang. Penelitian Agustin (2014) menemukan bahwa belum seluruh pemkab/pemkot di propinsi Sumatera Barat memanfaatkan menu transparansi pengelolaan anggaran (TPA) dalam *website* resmi pemerintah daerah untuk mempublikasikan secara lengkap dan konsisten jenis dokumen-dokumen terkait dengan penggunaan anggaran. Meskipun sebagian besar *website* Kabupaten di Sumatera Barat telah terdapat menu khusus/link bernama TPA (transparansi pengelolaan anggaran) untuk mendownload informasi atau dokumen keuangan dan kinerja tetapi menu khusus dan link tersebut terkadang kosong, tidak memuat secara lengkap, dan tidak dipublikasikan secara konsisten setiap tahunnya. Riset Agustin dan Arza (2019) juga menemukan anomali antara akuntabilitas dan transparansi publik terkait dengan manajemen pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas publik telah meningkat dalam 7 tahun terakhir (2012-2019), dimana seluruh pemerintah kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat mempublikasikan pada *website* resmi maupun media massa setiap opini WTP dari BPK atas

LKPD. Namun perilaku serupa tidak terjadi dalam konteks transparansi publik, dimana hampir setengah dari 19 pemerintah kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat yang bersedia mengungkapkan secara terbatas dokumen-dokumen terkait pengelolaan anggaran daerah (hanya 5-7 dokumen dari total 12 dokumen).

Terkait dengan pengungkapan informasi keuangan pemda, terdapat faktor yang kemungkinan memberikan dampak pada *internet budgeting reporting* di Pemda. Faktor pertama yang diduga bisa mempengaruhi *internet budgeting reporting* yaitu ukuran Pemda. Ukuran Pemda menunjukkan total aset yang dimiliki Pemda. Sehingga ukuran Pemda yang besar bisa menandakan aset yang besar, maka pengawasan masyarakat terhadap kegiatan pemerintah harus lebih ketat agar dapat mencegah penyimpangan alokasi dana oleh Pemda. Adanya pengawasan yang ketat akan cenderung mendorong pemerintah daerah untuk mempublikasikan laporan keuangan secara transparan (Nosihana & Yaya, 2016).

Ukuran pemda merupakan variabel besar atau kecilnya pemerintahan daerah tertentu yang pada umumnya diukur dengan total aset. Pemerintah daerah dengan aset besar dianggap berpotensi untuk melayani masyarakat dengan lebih baik. Secara otomatis kinerja pemda akan meningkat sesuai dengan besar asetnya (Alvini, 2018). Rahman, dkk. (2013:10) menyatakan bahwa aset yang besar akan memacu Pemda untuk mempublikasikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai petunjuk sinyal bahwa Pemda telah menjalankan kinerja pemerintahan yang baik.

Faktor kedua yang bisa berdampak pada *internet budgeting reporting* yaitu kekayaan Pemda. Dalam menjalankan fungsi dan wewenang Pemda yaitu kewenangan fiskal, daerah harus dapat mengidentifikasi potensi dan sumber daya yang ada. Pemda diharapkan lebih mampu menggali potensi sumber-sumber kekayaan di daerahnya untuk mencukupi pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Kekayaan (*wealth*) Pemda dapat diprosikan dari total Pendapatan Asli Daerah (Alvini, 2018). Dengan pendapatan daerah yang besar, pemerintah daerah akan memberikan informasi yang positif dan transparan kepada masyarakat dan menunjukkan kemampuan Daerah dalam memaksimalkan potensi sumber daya di daerah tersebut.

Faktor ketiga yang diduga dapat mempengaruhi *internet budgeting reporting* adalah jumlah penduduk. Sesuai dengan *Stakeholder Theory*, penduduk merupakan salah satu *Stakeholder* terpenting Pemerintah Daerah. Jumlah penduduk yang tinggi menunjukkan kebutuhan penyediaan layanan publik akan semakin tinggi. Jumlah penduduk semakin banyak, akan mengakibatkan tuntutan akan pengungkapan yang dilakukan oleh Pemda akan semakin besar pula, sesuai dengan fungsi Pemerintah sebagai abdi masyarakat (Pandansari, 2016).

Lembaga Badan Pusat Statistik menjabarkan bahwa penduduk adalah mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulan atau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap (www.bps.go.id). Pujoalwanto (2014:106) menyatakan bahwa secara umum pertumbuhan penduduk terjadi karena pertumbuhan penduduk alami yaitu pertumbuhan penduduk yang diketahui dari perhitungan selisih dari jumlah kelahiran dan jumlah kematian. Jadi untuk mengetahui pertumbuhan penduduk total adalah dengan cara menambah selisih dari jumlah kelahiran dan kematian dengan selisih jumlah dari imigrasi dengan emigrasi. Menurut Hendriyani & Tahar (2015), jumlah penduduk merupakan sebuah pengukuran yang menggambarkan kompleksitas suatu daerah. Jika jumlah penduduk tinggi maka seharusnya penyampaian informasi juga menjadi lebih terbuka.

Penelitian yang dilakukan oleh Prasetya & Irwandi (2012) meneliti ukuran perusahaan, profitabilitas, likuiditas, leverage, dan umur perusahaan terhadap pelaporan keuangan melalui internet. Hasil risetnya membuktikan bahwa variabel ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap pelaporan keuangan melalui internet. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nosihana & Yaya (2016) meneliti tentang kompetisi politik ukuran Pemda, rasio leverage, kekayaan Pemda, tipe Pemda, dan opini audit terhadap pelaporan keuangan melalui internet. Kesimpulan penelitian tersebut bahwa ukuran Pemda (SIZE) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pelaporan keuangan melalui internet melalui *E-government*.

Selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2015) menunjukkan bahwa kompleksitas pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah, kekayaan daerah dan belanja daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Junaedi (2015) didapatkan hasil bahwa kekayaan daerah, kompleksitas daerah, tipe pemerintah daerah dan kualitas audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan berbasis internet pada pemerintah daerah, sedangkan ketergantungan daerah dan tingkat penyimpangan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan berbasis internet pada pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Hendriyani & Tahar (2015) memperoleh kesimpulan bahwa tingkat ketergantungan daerah, belanja modal, dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Pada penelitian lainnya Hilmi & Martani (2012) juga memperoleh hasil kekayaan daerah dan jumlah penduduk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. Dengan tingginya angka jumlah penduduk maka masyarakat akan melakukan pengawasan lebih besar terhadap Pemda untuk mengungkap laporan keuangan pemerintah dengan lebih lengkap dan transparan.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membuktikan mengenai pengaruh ukuran Pemda, kekayaan Pemda dan jumlah penduduk terhadap pengungkapan *internet budgeting reporting* pada pemerintah kabupaten/kota di Pulau Sumatera 2016-2017. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat khususnya bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera untuk meningkatkan transparansi laporan anggaran pemerintah Daerah pada situs resmi, dan dapat menjadi referensi atau acuan bagi penelitian selanjutnya.

REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

Stakeholder Theory

Menurut Harahap bahwa perusahaan bukan hanya memegang tanggung jawab terhadap *Shareholder*, tetapi sekarang menjadi lebih luas yaitu *stakeholder* yang merupakan masyarakat luas, atau dikenal dengan tanggung jawab sosial (*social responsibility*). Peristiwa ini terjadi, disebabkan tuntutan dari masyarakat karena faktor *negative externalities* yang muncul dan juga karena adanya ketimpangan sosial (Hadi, 2011:93). Pelaporan keuangan melalui *internet* adalah salah satu cara untuk memberikan pertanggungjawaban kepada *stakeholder* (khususnya masyarakat) dengan biaya yang murah. Namun demikian, tidak semua pemerintah daerah yang secara sukarela memilih untuk mengambil manfaat dari *internet* sebagai media dalam melakukan pelaporan keuangan (Afriansyah & Haryanto, 2013).

Signaling Theory

Teori *signalling* telah dijelaskan bahwa pemerintah ingin memberikan signal yang baik kepada masyarakat karena pemerintah memiliki tanggung jawab dan amanah dalam membangun negara ini ke arah yang lebih maju ke depan. Cara mewujudkannya adalah dengan menyajikan laporan keuangan secara akurat, tidak menutup-nutupi dalam proses penyampaian informasi kinerja pemerintah, kemudian meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan memuat prestasi dan kinerja keuangan yang sederhana serta menarik untuk dibaca (Hilmi & Martani 2012). Inisiatif bagi Pemerintah Daerah untuk lebih transparan dalam pengelolaan pemerintahannya yang akan berujung balasan *signal* yang baik dari masyarakat yang akan terus mendukung pemerintah untuk terus maju dan berkembang dan lebih optimal dalam menyumbang kontribusi bagi negara (Nosihana & Yaya 2016).

Internet Budgeting Reporting

Publikasi laporan keuangan pemerintah melalui e-Government merupakan salah satu bentuk bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat. Akan tetapi sejauh ini pengungkapan tersebut lebih bersifat secara sukarela (*voluntary disclosure*) karena tidak ada sanksi yang diterapkan jika tidak dipenuhi (Nosihana & Yaya, 2016). Pelaporan keuangan berbasis internet adalah pengembangan terbaru dari teknologi *internet* yang merupakan bentuk informasi laporan keuangan yang dilakukan perusahaan dengan menggunakan media *internet*, yaitu melalui *website* pribadi yang dimiliki perusahaan (Prasetya dan Irwandi, 2012).

Ukuran Pemerintah Daerah

Ukuran pemerintah Daerah ditandai dengan besarnya aset yang dimiliki suatu daerah. Aset dapat mewakili seberapa besar pemerintahan, semakin besar aset maka semakin banyak modal yang ditanam (Nosihana & Yaya, 2016). Aset merupakan jumlah sumber daya yang dimiliki suatu entitas untuk melakukan kegiatan operasional entitas tersebut. Aset yang dimiliki juga dapat digunakan untuk pembuatan laporan keuangan entitas tersebut. Semakin besar jumlah aset maka semakin besar sumber daya yang bisa digunakan untuk melakukan pengungkapan yang lebih besar (Hilmi & Martani, 2012).

Kekayaan Pemerintah Daerah

Kekayaan daerah diasumsikan dengan seberapa besar kinerja pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatannya, baik yang berasal dari pendapatan asli daerah maupun lain-lain pendapatan yang sah. Pemerintah daerah yang memiliki kekayaan daerah yang tinggi cenderung akan memberikan informasi atas laporan keuangannya secara penuh sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat luas dan menunjukkan kepada para stakeholdernya bahwa Pemerintah Daerah tersebut telah menghasilkan kinerja yang tinggi dan telah ikut serta dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pula (Ramdhani, 2016).

Jumlah Penduduk

Lembaga Badan Pusat Statistik menjabarkan “Penduduk adalah mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulan atau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap.”(www.bps.go.id).

Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap *Internet Budgeting Reporting*

Ukuran Pemda merupakan variabel besar atau kecilnya pemerintahan daerah tertentu yang pada umumnya diukur dengan total aset. Pemerintah daerah dengan aset besar dianggap berpotensi untuk melayani masyarakat dengan lebih baik. Secara otomatis kinerja Pemda akan meningkat sesuai dengan besar asetnya (Alvini, 2018). Ukuran Pemda yang besar menandakan jumlah kekayaan besar sehingga masyarakat akan lebih mengawasi kegiatan pemerintah karena khawatir dana yang dikelola diselewengkan. Pemerintah akan berupaya semaksimal mungkin mengurangi asimetri terkait informasi keuangan dari anggapan negatif masyarakat (Nosihana & Yaya, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Prasetya & Irwandi (2012) membuktikan bahwa variabel ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan melalui internet. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Nosihana & Yaya (2016) memperoleh kesimpulan bahwa ukuran Pemda (SIZE) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan melalui internet melalui *E-government*. Berdasarkan penelitian dan pernyataan terdahulu, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₁: Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap *internet budgeting reporting*.

Pengaruh Kekayaan Pemerintah Daerah terhadap *Internet Budgeting Reporting*

Kekayaan (*wealth*) pemerintah daerah dapat diproksikan dari total Pendapatan Asli Daerah (Alvini, 2018). Dengan pendapatan daerah yang besar, pemerintah daerah akan memberikan informasi yang positif dan transparan kepada masyarakat dan menunjukkan kemampuan Daerah dalam memaksimalkan potensi sumber daya di daerah tersebut. Halim (2012:101) mengemukakan tentang Pendapatan Asli Daerah bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan tersebut bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya yang sah.

Kekayaan atau pendapatan daerah yang besar akan rentan terjadi penyelewengan jika tidak diawasi. Maka selaku *principal*, masyarakat akan lebih mengawasi kinerja Pemda dan mendorong pengelolaan keuangan yang lebih transparan. Dengan mempublikasi laporan keuangan, Pemda dapat lebih mengurangi asimetri informasi antara Pemda dan masyarakat (Pratama, 2015). Hasil penelitian Pratama (2015) menunjukkan bahwa kekayaan daerah yang diproksikan dengan pendapatan asli daerah (PAD) pada setiap daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Junaedi (2015) didapatkan hasil bahwa kekayaan daerah memiliki pengaruh dan signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan berbasis internet pada pemerintah daerah. Berdasarkan penelitian dan pernyataan terdahulu, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₂: Kekayaan pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap *internet budgeting reporting*.

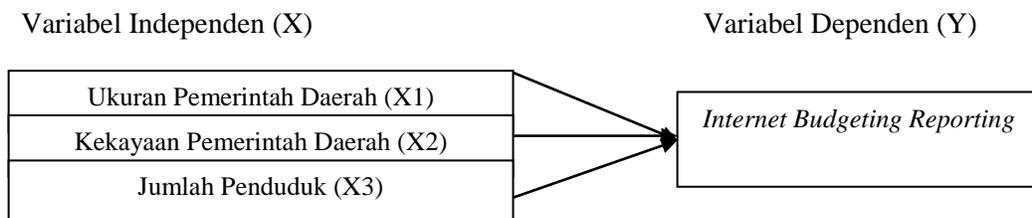
Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap *Internet Budgeting Reporting*

Sesuai dengan *Stakeholder Theory*, penduduk merupakan salah satu *Stakeholder* terpenting Pemerintah Daerah. Jumlah penduduk yang tinggi menunjukkan kebutuhan penyediaan layanan publik akan semakin tinggi. Jumlah penduduk semakin banyak, akan

mengakibatkan tuntutan akan pengungkapan yang dilakukan oleh Pemda akan semakin besar pula, sesuai dengan fungsi Pemerintah sebagai abdi masyarakat (Pandansari, 2016). Semakin besar jumlah penduduk maka semakin besar dorongan dari masyarakat untuk meminta pengungkapan yang lebih besar dalam laporan keuangan pemerintah. Semakin kompleks pemerintahan maka semakin besar pengungkapan yang harus mereka lakukan (Hendriyani & Tahar 2015).

Penelitian yang dilakukan oleh Hendriyani & Tahar (2015) memperoleh kesimpulan bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Pada penelitian lainnya Hilmi & Martani (2012) juga menemukan bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. Berdasarkan penelitian dan pernyataan terdahulu, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₃ : Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap *internet budgeting reporting*.



Gambar 1.
Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif asosiatif, yaitu penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2013:57).

Populasi dan Sampel

Pada penelitian ini, yang menjadi populasi adalah seluruh pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. Pada penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel yang dilakukan dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013:126). Pertimbangan atau kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut ini.

- a. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera yang menerbitkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2016 dan 2017.
- b. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera yang menerbitkan LKPD yang telah diaudit oleh BPK RI serta menyajikan data dan informasi yang dibutuhkan untuk pengukuran variabel penelitian.
- c. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai *website* resmi untuk dapat diakses publik.

Total sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 154 pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera

Jenis dan teknik pengumpulan data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data total aset dan total PAD pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, data jumlah penduduk. Kemudian melihat ada tidaknya penyajian LKPD pada situs resmi pemerintah Kabupaten/Kota yang menjadi sampel penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan dokumen yang dilakukan dengan memperoleh data yang telah dipublikasikan melalui situs internet dan situs pemerintah daerah.

Pengujian hipotesis

Uji Parsial (Uji T)

Ghozali (2016:97) mengemukakan bahwa statistik uji t pada dasarnya menunjukkan pengaruh satu variabel penjelas/bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat.

$H_0 : b_i = 0$ Artinya tidak ada pengaruh signifikan secara parsial

$H_A : b_i \neq 0$ Artinya, ada pengaruh signifikan secara parsial.

Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis:

- a) Jika $\text{sig} > 0,05$ atau $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ maka H_A ditolak atau H_0 diterima
- b) Jika $\text{sig} < 0,05$ atau $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ maka H_A diterima atau H_0 ditolak

Teknik Analisis Data

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk pengujian normalitas adalah dengan melihat normal probability *Plot*.

b. Uji Multikolinearitas

Untuk mengecek multikolinieritas pada model regresi adalah dengan membandingkan nilai tolerance maupun VIF (variance inflation factor). Jika nilai toleransi $\leq 0,10$ atau nilai VIF ≥ 10 maka model regresi menunjukkan adanya multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Tujuan uji heteroskedastisitas yaitu menguji ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain pada model regresi. Jika residual satu pengamatan ke pengamatan lain variansinya tetap maka dikatakan homoskedastisitas dan apabila variance berbeda maka dikatakan telah terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2016:107) uji autokorelasi bertujuan untuk menguji korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya) pada model regresi yang digunakan. Teknik untuk pengujian autokorelasi adalah dengan metode Run-Test. Run-Test digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau sistematis. Data dianggap terbebas dari autokorelasi jika memenuhi kriteria $\text{Asymp sig} > \alpha$

2. Uji Regresi Linear Berganda

Persamaan regresi berganda merupakan persamaan regresi dengan menggunakan dua atau lebih variabel bebas.

Bentuk persamaan regresi berganda:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

3. Koefisien Determinasi (R^2)

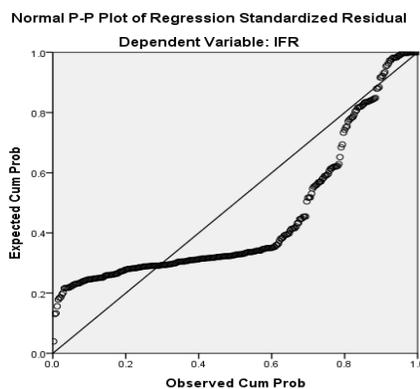
Ghozali (2016:95) menyatakan bahwa koefisien determinasi (R^2) adalah untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Semakin besar nilai determinasi, maka kemampuan model akan semakin baik dalam memprediksi variabel

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji normalitas diatas menunjukkan bahwa titik data menyebar disekitar garis diagonal dan bergerak mengikuti arah garis diagonal atau dapat dikatakan menunjukkan pola distribusi normal. Berdasarkan uji normalitas dengan normal probability *Plot*, maka terlihat data berdistribusi normal.



Gambar 2.
Hasil Uji Normalitas

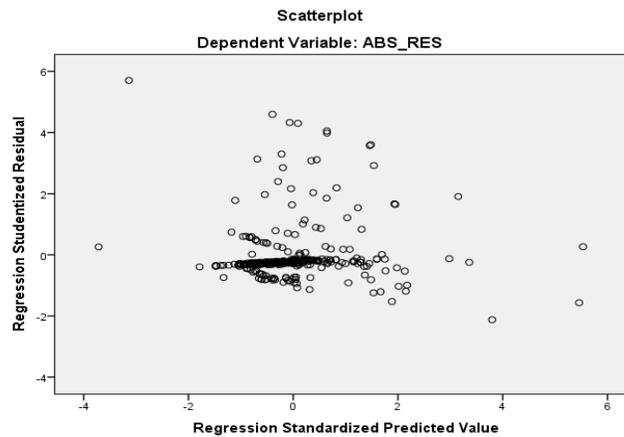
2) Uji Multikolinearitas

Tabel 1.
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Ukuran Pemda	0.514	1.944
Kekayaan Pemda	0.444	2.253
Jumlah Penduduk	0.450	2.221

Berdasarkan hasil diatas dapat nilai *tolerance* dari variabel ukuran pemda, kekayaan pemda, dan jumlah penduduk lebih besar dari 0,1 (0,514 untuk ukuran pemda, 0,444 untuk kekayaan pemda, dan 0,450 untuk jumlah penduduk). Kemudian nilai VIF dari ketiga variabel independen juga lebih kecil dari 10 (1,944 untuk ukuran pemda, 2,253 untuk kekayaan pemda, dan 2,221 untuk jumlah penduduk). Berdasarkan kriteria uji multikolinearitas maka disimpulkan tidak ada multikolinearitas pada model regresi yang digunakan.

3) Uji Heteroskedastisitas



Gambar 3.
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas di atas menunjukkan titik-titik data menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y. Penyebaran data juga tidak membentuk pola yang jelas dan teratur. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas pada model regresi yang digunakan.

4) Uji Autokorelasi

Tabel 2.
Hasil Uji Autokorelasi
Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-1.29867
Cases < Test Value	154
Cases >= Test Value	154
Total Cases	308
Number of Runs	171
Z	1.826
Asymp. Sig. (2-tailed)	.068

a. Median

Hasil uji autokorelasi menunjukkan nilai *asympt. sig.* sebesar 0,068 lebih besar dari tingkat signifikansi yaitu 0,05. Berdasarkan kriteria uji autokorelasi, dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi dalam model regresi yang digunakan dalam penelitian ini.

b. Uji Hipotesis

1) Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 3.
Hasil Uji Regresi Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-24.078	11.529		-2.089	.038
1					
Ukuran Pemda	.905	.412	.172	2.198	.029
Kekayaan Pemda	.001	.001	.036	.425	.671
Jumlah Penduduk	.029	.668	.004	.043	.966

a. Dependent Variable: Internet Budgeting Reporting

Berdasarkan tabel diatas dapat dibentuk model persamaan sebagai berikut :

$$Y = -24.078 + 0.X_1 + 0.001 X_2 + 0.029 X_3$$

- Y = *Internet Budgeting Reporting*
α = Konstanta
β₁- β₂,β₃ = Koefisien regresi
X₁ = Ukuran Pemerintah Daerah
X₂ = Kekayaan Pemerintah Daerah
X₃ = Jumlah Penduduk
e = *Error*

Dari persamaan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Nilai konstanta a = -24.078 artinya jika ukuran pemda, kekayaan pemda, dan jumlah penduduk sama dengan nol, maka *Internet Budgeting Reporting* adalah sebesar -24.078.
- b₁ = 0.905 artinya jika ukuran pemda meningkat sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain tetap, maka *Internet Budgeting Reporting* akan meningkat sebesar 0.905 satuan.
- b₂ = 0.001 artinya jika kekayaan pemda meningkat sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain tetap, maka *Internet Budgeting Reporting* akan meningkat sebesar 0.001.
- b₃ = 0.029 artinya jika jumlah penduduk meningkat sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain tetap, maka *Internet Budgeting Reporting* akan meningkat sebesar 0.029.

2) Uji Parsial (Uji T)

- Pengaruh variabel ukuran pemerintah daerah terhadap *internet budgeting reporting*
Hipotesis pertama adalah ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif. Berdasarkan hasil tabel di atas, hipotesis pertama memiliki nilai signifikansi 0,029 < 0,005. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap *internet budgeting reporting*, dengan demikian hipotesis pertama (H₁) diterima.
- Pengaruh variabel kekayaan pemerintah daerah terhadap *internet budgeting reporting*
Hipotesis kedua adalah kekayaan pemerintah daerah berpengaruh positif. Berdasarkan hasil tabel di atas, hipotesis kedua memiliki nilai signifikansi 0,671 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini tidak dapat membuktikan kekayaan pemerintah daerah berpengaruh

signifikan terhadap *internet budgeting reporting*, dengan demikian hipotesis kedua (H₂) ditolak.

- c) Pengaruh variabel jumlah penduduk terhadap *internet budgeting reporting*
 Hipotesis ketiga adalah jumlah penduduk berpengaruh positif. Berdasarkan hasil tabel di atas, hipotesis ketiga memiliki nilai signifikansi $0,966 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini tidak dapat membuktikan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap *internet budgeting reporting*, dengan demikian hipotesis ketiga (H₃) ditolak.

3) Uji Koefisien Determinasi (R²)

Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan nilai koefisien determinasi (*R Square*) sebesar 0,040. Dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran pemda, kekayaan pemda, dan jumlah penduduk secara keseluruhan mampu menjelaskan *internet budgeting reporting* pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera tahun 2016-2017 sebesar 4,0% sedangkan sisanya sebesar 96,0% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti.

Tabel 4.
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.200 ^a	.040	.030	2.894

a. Predictors: (Constant), Jumlah Penduduk, Ukuran Pemda, Kekayaan Pemda

b. Dependent Variable: Internet Budgeting Reporting

Pembahasan

Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap *Internet Budgeting Reporting*

Pada pengujian hipotesis pertama, diketahui bahwa variabel ukuran pemda berpengaruh positif dan signifikan terhadap *internet budgeting reporting* pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera tahun 2016-2017. Pada penelitian ini ukuran pemerintah daerah dilihat dari total aset yang dimiliki Daerah. Hal ini sebagaimana dinyatakan Nosihana & Yaya (2016) bahwa ukuran pemerintah Daerah ditandai dengan besarnya aset yang dimiliki suatu daerah. Aset dapat menunjukkan besarnya suatu pemerintahan, semakin besar aset maka modal yang ditanam juga semakin banyak.

Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu Pratama (2015) bahwa ukuran pemerintah daerah memiliki pengaruh terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah. Begitu juga dengan penelitian Prasetya & Irwandi (2012) dimana hasil penelitiannya juga mendukung bahwa variabel ukuran perusahaan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap pelaporan keuangan melalui internet pada perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Penelitian lainnya yang mendukung adalah Nosihana & Yaya (2016) yang menemukan bahwa ukuran pemerintah daerah memiliki pengaruh terhadap pelaporan keuangan melalui internet pada Pemerintah Kota dan Kabupaten Di Indonesia.

Dapat disimpulkan bahwa Pemda dengan tingkat aset yang besar juga akan memiliki tekanan besar dari masyarakat dalam hal penyajian laporan keuangannya, dalam rangka peningkatan transparansi dan meminimalisasi asimetri informasi. Ukuran Pemda yang besar dapat menjadi indikasi bahwa ada jumlah aset yang besar pula di daerah tersebut, sehingga

pengawasan dari masyarakat terhadap segala aktivitas maupun kegiatan pemerintah akan semakin ketat. Hal ini dikarenakan masyarakat khawatir akan terjadi penyelewengan dana oleh pemerintah daerah. Karena adanya pengawasan yang besar maka pemerintah akan cenderung terdorong untuk mempublikasikan laporan keuangan melalui *internet* sesuai dengan yang disampaikan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri terkait transparansi pengelolaan anggaran daerah di Indonesia.

Pengaruh Kekayaan Pemerintah Daerah Terhadap *Internet Budgeting Reporting*

Pada pengujian hipotesis kedua, variabel kekayaan pemda terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap *internet budgeting reporting* pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera tahun 2016-2017. Teori *signalling* telah dijelaskan bahwa pemerintah ingin memberikan signal yang baik kepada masyarakat karena pemerintah memiliki tanggung jawab dan amanah dalam membangun negara ini ke arah yang lebih maju ke depan. Cara mewujudkannya adalah dengan menyajikan laporan keuangan secara akurat, tidak menutup-nutupi dalam proses penyampaian informasi kinerja pemerintah, kemudian meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan memuat prestasi dan kinerja keuangan yang sederhana serta menarik untuk dibaca (Hilmi & Martani 2012).

Kekayaan atau pendapatan daerah yang besar akan rentan terjadi penyelewengan jika tidak diawasi. Maka selaku *principal*, masyarakat akan lebih mengawasi kinerja Pemda dan mendorong pengelolaan keuangan yang lebih transparan. Dengan mempublikasi laporan keuangan, Pemda dapat lebih mengurangi asimetri informasi antara Pemda dan masyarakat (Pratama, 2015). Pratama (2015) menambahkan Pemerintah Daerah dengan kekayaan yang besar juga menanggung biaya pengawasan yang lebih tinggi dalam memenuhi tuntutan transparansi dari masyarakat. Melalui publikasi laporan keuangan, Pemda dapat menyampaikan informasi keuangan yang lebih lengkap dengan biaya yang relatif murah, sehingga asimetri informasi antara pemerintah daerah dan masyarakat dapat dikurangi. Dari informasi tersebut diketahui ada hubungan positif antara kekayaan pemerintah daerah dengan *internet budgeting reporting*.

Hasil ini mendukung penelitian Nosihana & Yaya (2016) bahwa kekayaan Pemda tidak memiliki pengaruh terhadap pelaporan keuangan melalui internet pada Pemerintah Kota dan Kabupaten Di Indonesia. Selain itu, hasil ini sesuai dengan penelitian Afryansyah & Haryanto (2013) yang memperoleh kesimpulan bahwa kekayaan daerah tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan informasi akuntansi di *Internet* Oleh Pemerintah Daerah. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian Hendriyani & Tahar (2015) yang menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan dalam laporan keuangan dari pemerintah provinsi di Indonesia.

Dapat disimpulkan bahwa dengan pendapatan daerah yang besar, pemerintah daerah akan memberikan informasi yang positif dan transparan kepada masyarakat dan menunjukkan kemampuan Daerah dalam memaksimalkan potensi sumber daya di daerah tersebut. Semakin tinggi tingkat kekayaan daerah maka akan semakin memacu Pemda mengungkapkan keuangannya melalui *internet* secara lebih transparan. Tingkat kekayaan daerah yang tinggi juga bisa dianggap sebagai tanda keseriusan pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerjanya, hal ini merupakan sinyal positif bagi daerah. Dengan menyampaikan informasi keuangan di situs resmi Kabupaten/Kota secara lengkap maka pemerintah daerah dinilai positif oleh masyarakat karena dianggap lebih bertanggung jawab dalam transparansi pengelolaan anggaran.

Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap *Internet Budgeting Reporting*

Pada pengujian hipotesis ketiga, variabel jumlah penduduk juga tidak berpengaruh signifikan terhadap *internet budgeting reporting* pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera tahun 2016-2017. Sesuai dengan *Stakeholder Theory*, penduduk merupakan salah satu *Stakeholder* terpenting Pemerintah Daerah. Jumlah penduduk yang tinggi menunjukkan kebutuhan penyediaan layanan publik akan semakin tinggi. Jumlah penduduk semakin banyak, akan mengakibatkan Pemda akan semakin dituntut melakukan pengungkapan yang lebih, karena Pemerintah berfungsi sebagai abdi masyarakat (Pandansari, 2016). Hendriyani & Tahar (2015) juga menemukan bahwa semakin besar jumlah penduduk maka semakin besar dorongan dari masyarakat untuk meminta pengungkapan yang lebih besar dalam transparansi laporan keuangan pemerintah. Hal ini memperlihatkan adanya hubungan yang positif antara jumlah penduduk dengan dengan pengungkapan laporan keuangan melalui internet.

Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya Afriansyah & Haryanto (2013) dimana jumlah penduduk tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan melalui internet oleh Pemda. Namun demikian, adanya hubungan positif yang ditemukan sejalan dengan Hilmi & Martani (2012) yang menemukan bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Provinsi. Dapat disimpulkan bahwa perubahan jumlah penduduk Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera tahun 2016-2017 tidak seiring dengan perubahan *internet budgeting reporting* sehingga tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Jumlah penduduk suatu daerah yang semakin tinggi maka kecenderungan tingkat pengungkapan informasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut juga akan semakin tinggi. Akan tetapi, jika penduduk tidak terlibat atau tidak melakukan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pemerintah daerah, maka pengungkapan laporan di internet oleh pemerintah daerah bisa saja tidak mengalami peningkatan yang signifikan seperti ditemukan pada penelitian ini.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap *internet budgeting reporting* pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera tahun 2016-2017. Kekayaan pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap *internet budgeting reporting* pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera tahun 2016-2017. Jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap *internet budgeting reporting* pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera tahun 2016-2017

Keterbatasan

Adapun keterbatasan pada penelitian ini dimana penelitian ini hanya menggunakan data yang terbatas pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. Sedangkan praktik E-Government sudah mencakup seluruh provinsi di Indonesia. Kemudian pada penelitian ini hanya terdapat satu variabel yang berpengaruh signifikan terhadap *internet budgeting reporting*.

Saran Untuk Penelitian Selanjutnya

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan dalam penelitian ini, peneliti menyarankan untuk mengidentifikasi variabel lain yang dapat mempengaruhi *internet budgeting reporting* sehingga

dapat memprediksi secara lebih akurat. Variabel-variabel lain yang dapat diteliti misalnya tipe pemerintah daerah, kualitas audit, tingkat belanja daerah dan sebagainya. Peneliti selanjutnya juga dapat melakukan penelitian dengan topik yang sama tetapi menggunakan sampel yang lebih luas, sehingga diharapkan hasil penelitian selanjutnya dapat digeneralisasi pada seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia maupun seluruh Provinsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Henri; Arza, Fefri Indra. (2019). *Potrait of Accountability and Transparency in Local Budget Management by the Regional Government in West Sumatera Province, Indonesia: An Anomaly in Digital Era*. 4th Padang International Conference on Education, Economics, Business and Accounting (PICEEBA-2 2019). Padang. 154-166.
- Agustin, Henri. (2014). *Publikasi Dokumen Pengelolaan Anggaran pada Website Pemkab/Pemkot di Propinsi Sumatera Barat*. Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI). Yogyakarta.
- Afryansyah, R.D. & Haryanto. (2013). “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Akuntansi di Internet Oleh Pemerintah Daerah”. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(3), 1-11.
- Alvini, Y. (2018). “Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan Daerah Kepada Pemerintah Pusat dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau Periode 2011-2016)”. *JOM FEB*, 1(1), 1-15.
- Cheisviyanny, C., Helmy, H. & Dwita, S. (2018). “Analisis Kualitas Website Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat”. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 1087 – 1104.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah*. (4th Ed). Jakarta: Salemba Empat.
- Hendriyani, R. & Tahar, A. (2015). “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia”. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, 22(1), 25 – 33.
- Hilmi, A. Z. & D. Martani. (2012). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin*.
- Instruksi Mendagri nomor: 188.52/1797/SJ Tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah.
- Junaedi. (2015). “Pengaruh Kekayaan Pemerintah Daerah, Ketergantungan Daerah, Kompleksitas, Tipe Pemerintah Daerah, Kualitas Audit dan Tingkat Penyimpangan Anggaran Terhadap Pengungkapan *Internet-Based Financial Reporting*”. *Jurnal Sainstech Politeknik Indonusa Surakarta*, 2(4), 42-54.
- Nosihana, A & Yaya, R. (2016). “*Internet Financial Reporting* dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya Pada Pemerintah Kota dan Kabupaten Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 3(2), 87-101.
- Novia, Siswita; Arza, Fefri Indra; Agustin, Henri. (2015). Studi Kebutuhan Informasi Pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang (Studi Empiris pada DPRD dan SKPD Kota Padang). *Jurnal WRA*, 3(1), 529-548.

- Pandansari, T. (2016). "Tingkat Ketergantungan, Kompleksitas Pemerintah, dan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 19(3), 463-485.
- Prasetya, M. & Irwandi, S.A. (2012). "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaporan Keuangan Melalui Internet (*Internet Financial Reporting*) pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia". *The Indonesian Accounting Review*, 2(2), 151-158.
- Pratama, K.A.D. (2015). "Pengaruh Kompleksitas Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Kekayaan Daerah, dan Belanja Daerah Terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2010-2013)". *e-Journal Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha*, 3(1), 1-12.
- Pujoalwanto, B. (2014). *Perekonomian Indonesia: Tinjauan Historis, Teoritis, dan Empiris*. (Cet.1). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ramdhani, D. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Propinsi Banten. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 9(2), 146-160.
- Setyaningrum, D. (2012). "Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 9(2), 154-170.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. (Cet.4). Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor: 14/ 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
https://www.bps.go.id/istilah/index.html?Istilah_page=41. Accessed on date January 27, 2019
www.kemendagri.go.id. Accessed on date January 27, 2019
www.bpk.go.id. Accessed on date January 27, 2019